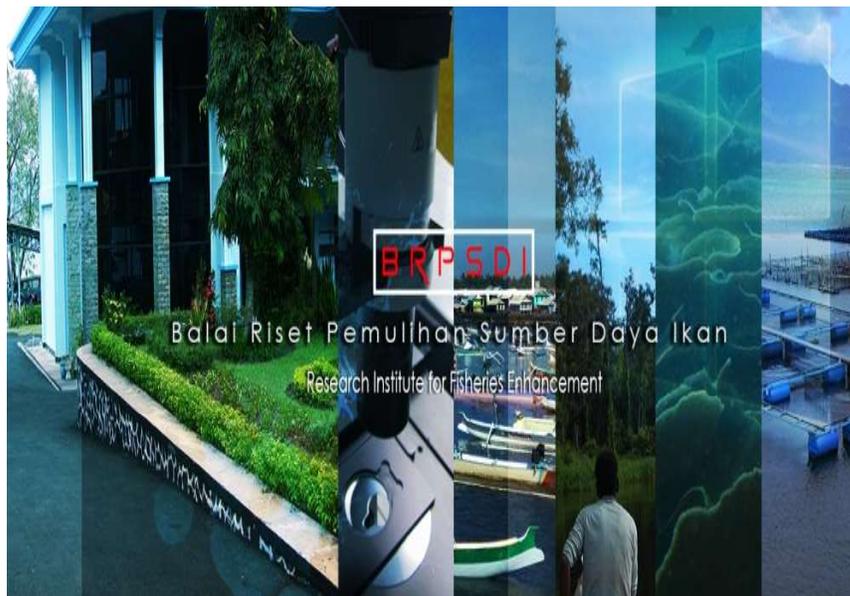


Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan

Laporan Keuangan

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024



Jl. Cilalawi No. 01 Ds. Jatimekar Kec. Jatiluhur
Kab. Purwakarta Prov. Jawa Barat
Kode Pos : 41152

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor : S-3/PB/PB/2025 tanggal 01 Januari 2025 perihal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan keuangan Kementerian/Lembaga taun 2024 (Unaudited) dan Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan nomor : B.55/SJ/KU.510/I/2025 tanggal 14 Januari 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 (Unaudited) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi , Peraturan Menteri Keuangan nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat, Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu PIPK Pemerintah Pusat serta Peraturan Menteri Keuangan nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi Covid 19. Laporan Keuangan ini telah disusun

dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Purwakarta, 14 Januari 2025

Kepala Balai,



The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring contains the text 'KEMENTERIAN KELAUTAKAN DAN PERIKANAN' at the top and 'REPUBLIK INDONESIA' at the bottom. Inside the ring, there is a smaller circle with the text 'BALAI RISET DAN PENGENDALIAN' and 'SUNDBER DASAR'. A handwritten signature in black ink is written across the center of the stamp.

Ir. Iswari Ratna Astuti

BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN
JL. CILALAWI NO. 1 JATILUHUR PURWAKARTA JAWA BARAT
LAMAN : <https://bp2ksi.litbang.kkp.go.id> E-MAIL : bp2ksi@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan per 31 Desember 2024 Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2024 Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan per 31 Desember 2024 tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Purwakarta, 14 Januari 2024
Kepala Balai,

Ir. Iswari Ratna Astuti
NIP. 196911241995032001



Laporan Keuangan per 31 Desember 2024 Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Tahun Anggaran 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Menteri Keuangan nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19), Surat Dirjen Perbendaharaan nomor S-369/PB/2020 tanggal 27 April 2020 perihal Pemutakhiran akun dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19 yang menyediakan akun-akun untuk menampung alokasi belanja dalam rangka penanganan Covid-19 dan Keputusan Dirjen Perbendaharaan nomor KEP-273/PB/2020 tentang Pemutakhiran Kodefikasi segmen Akun pada Bagan Akun Standar serta berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2024 Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Tahun Anggaran 2024 menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan - LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak senilai Rp 16.993.250,- atau mencapai 850% (Delapan ratus lima puluh persen) dari estimasi Pendapatan-LRA senilai Rp. 2,000,000,- .

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2024 Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp.6.429.107.838,- atau mencapai 97,04% (Sembilan puluh tujuh koma empat persen) dari alokasi anggaran senilai Rp. 6.624.877.000,- sehingga masih terdapat anggaran yang tidak/belum terserap senilai Rp. 195.769.162,- atau mencapai 2,96% (Dua koma Sembilan puluh enam persen) dari jumlah anggaran yang dimiliki Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan pada Tahun Anggaran 2024. Nilai realisasi belanja Negara

tersebut terdiri dari Belanja Pegawai senilai Rp. 2.581.690.838,- Belanja Barang senilai Rp.3.847.417.204,- dan Belanja Modal senilai Rp.0,-.

2. NERACA

Neraca Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2024 Tahun Anggaran 2024 menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan senilai Rp. 11.695.878.718,- yang terdiri dari : Aset Lancar senilai Rp. 50.000,- ; Aset Tetap (neto) senilai Rp. 11.120.530.313,- ; dan Aset Lainnya (neto) senilai Rp.575.298.405,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing senilai Rp.93.941.636,- dan Rp. 11.601.937.082 ,- sehingga jumlah nilai Kewajiban dan Ekuitas senilai Rp. 11.695.878.718,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2024 Tahun Anggaran 2024 menyajikan berbagai unsur Pendapatan Operasional, Beban Operasional, Surplus/Defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp. 16.993.250,- sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional sampai dengan 31 Desember 2024 adalah senilai (Rp.6.610.664.565,-) sehingga terdapat Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp.6.593.671.045,-. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional dan Surplus Pos-pos Luar Biasa masing-masing senilai Rp.0,- dan senilai Rp.0,- sehingga entitas mengalami Surplus/(Defisit)-LO senilai Rp.6.593.671.045,-.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan pada per 31 Desember 2024 Tahun Anggaran 2024 menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal pada tanggal 01 Januari 2024 adalah senilai Rp. 11.763.952.309,- dikurangi Surplus/(Defisit)-LO senilai (Rp.6.593.671.045) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.41.500,- dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp. 6.431.614.318,- . adanya penurunan Ekuitas senilai (Rp.162.015.227)sehingga nilai Ekuitas Akhir terhitung per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp. 11,601.937.082,- .

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Tahun (BRPSDI) per 31 Desember 2024 Tahun Anggaran 2024 menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2024 Tahun Anggaran 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2024		% thd Angg
		ANGGARAN	REALISASI	
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	A.1			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	A.1.1	2,000,000	16,993,520	849.68
JUMLAH PENDAPATAN		2,000,000	16,993,520	849.68
B. BELANJA NEGARA	B.2.			
Belanja Pegawai	B.2.1	2,606,977,000	2,581,690,634	99.03
Belanja Barang	B.2.2	4,017,900,000	3,847,417,204	95.76
Belanja Modal	B.2.3	-	-	-
JUMLAH BELANJA		6,624,877,000	6,429,107,838	97.04

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN NERACA PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

URAIAN	CATATAN	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.2	-	-
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	C.3	-	-
Persediaan	C.4	50,000	41,500
Jumlah Aset Lancar		50,000	41,500
ASET TETAP			
Tanah	C.5	8,962,232,000	8,962,232,000
Peralatan dan Mesin	C.6	8,781,021,140	8,761,521,140
Gedung dan Bangunan	C.7	5,323,897,000	5,940,954,000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.8	1,431,867,000	1,431,867,000
Aset Tetap Lainnya	C.9	107,898,000	107,898,000
Akumulasi Penyusutan	C.10	(13,486,384,827)	(13,444,083,831)
Jumlah Aset Tetap		11,120,530,313	11,760,388,309
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.11	-	43,350,000
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.12	80,493,041	-
Aset Lain-Lain	C.13	660,407,000	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.13	(165,601,636)	(39,827,500)
Jumlah Aset Lainnya		575,298,405	3,522,500
JUMLAH ASET		11,695,878,718	11,763,952,309
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.14	93,941,636	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.15	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.16	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		93,941,636	-
JUMLAH KEWAJIBAN		93,941,636	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.17	11,601,937,082	11,763,952,309
JUMLAH EKUITAS		11,601,937,082	11,763,952,309
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		11,695,878,718	11,763,952,309

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	2,581,690,634	2,420,902,121
Beban Persediaan	D.3	12,033,000	36,069,000
Beban Barang dan Jasa	D.4	2,368,471,365	2,350,697,980
Beban Pemeliharaan	D.5	1,312,469,323	1,229,314,616
Beban Perjalanan Dinas	D.6	167,925,111	226,277,757
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	168,075,132	345,887,906
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		6,610,664,565	6,609,149,380
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(6,593,671,045)	(6,580,227,020)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.12	-	(13,511,250)
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		-	13,511,250
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.13	-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		6,593,671,045	6,593,738,270
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa	D.15	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) - LO		6,593,671,045	6,593,738,270

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	11,763,952,309	12,110,603,214
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(6,593,671,045)	(6,593,738,270)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	41,500	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.4	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.5	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP/LAINNYA NON RE	E.3.6	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.7	-	-
JUMLAH		41,500	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	6,431,614,318	6,247,087,365
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(162,015,227)	(346,650,905)
EKUITAS AKHIR	E.5	11,601,937,082	11,763,952,309

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan

A.1.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

*Dasar
Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan, yang selanjutnya disingkat BRPSDI, merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan Eselon III.b di bidang riset pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Riset Sumber Daya Manusia dan Kelautan dan Perikanan yang menangani riset kelautan dan perikanan serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Dalam pelaksanaan tugasnya, BRPSDI berada dalam koordinasi dan supervisi dari Sekretariat BPPSDMKP. Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI) dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.80/MEN/2020 Perubahan atas PER.17/MEN/2017, tanggal 27 Maret 2020 yang mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB) dalam surat Nomor: B/116/M.KT.01/2017 tanggal 7 Januari 2017 namun tetap dengan tugas dan fungsi sama. Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan dipimpin oleh seorang Kepala Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan dibentuk sebagai salah satu upaya pemerintah diwakili oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pemulihan sumber daya ikan. Organisasi dan tata kerja Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor

: 80/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan.

Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan berkedudukan di Jalan Cilalawi nomor 01 Desa Jatimekar Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat Kode Pos 41152 telah memiliki sejarah yang cukup panjang sebagai lembaga riset. Perubahan nomenklatur lembaga tersebut telah banyak mengalami perubahan sejak tahun 1965 hingga 2017. Sejarah perkembangan nomenklatur lembaga sebagai berikut :

- Tahun 1965 : Stasiun Penelitian Perikanan Jatiluhur, di bawah Direktorat Jenderal Perikanan, Departemen Pertanian.
- Tahun 1970 : Lembaga Penelitian Perikanan Darat (LPPD) cabang Jatiluhur (eselon III), di bawah Direktorat Jenderal Perikanan, Departemen Pertanian.
- Tahun 1980 : Sub Balai Penelitian Perikanan Darat (eselon IV), di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian.
- Tahun 1984 : Sub Balai Penelitian Perikanan Air Tawar (eselon IV), di bawah Badan Penelitian dan pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian.
- Tahun 1995 : Instalasi Balai Penelitian Perikanan Air Tawar Jatiluhur, di bawah Balai Penelitian Perikanan Air Tawar Sukamandi, Departemen Pertanian.
- Tahun 2000 : Instalasi Pemacuan Stok Ikan, di bawah Balai Penelitian Perikanan Laut Jakarta, Departemen Kelautan dan Perikanan.
- Tahun 2003 : Loka Penelitian Pemacuan Stok Ikan (LRPSI) (eselon IV), di bawah Pusat Penelitian

Perikanan Tangkap, Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan.

- Tahun 2009 : Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSI), di bawah Pusat Penelitian Perikanan Tangkap, Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan.
- Tahun 2011 : Balai Penelitian Pemulihan dan Konservasi Sumber Daya Ikan (BP2KSI) di bawah Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan (P4KSI), Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Tahun 2017 hingga sekarang : Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI), di bawah Pusat Riset Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tugas dan Fungsi Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan dalam mendukung tercapainya IKU Badan Penyuluhan dan Pengembang Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) melalui kegiatan yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja (TAPJA) sebagian besar telah selesai dilaksanakan. Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan mempunyai tugas melaksanakan riset pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut. Secara kelembagaan, berdasarkan PER.80/MEN/2020 Perubahan atas Pasal 3 PER.17/MEN/2017 terkait tugasnya Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan laporan.
- b. Pelaksanaan riset pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut meliputi riset pemulihan sumber daya

ikan, mencangkup *restocking* sumber daya ikan dan rehabilitasi/restorasi habitat.

- c. Pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi dan pengelolaan kerja sama riset.
- d. Pengelolaan prasarana dan sarana riset.
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Keberadaan Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI) menjadi sangat strategis mengingat di Indonesia belum terdapat lembaga penelitian yang memiliki tugas pokok dan fungsi terkait dengan upaya pemulihan dan konservasi sumber daya ikan. Strategi pelaksanaan riset pemulihan sumber daya ikan dibagi menjadi empat tahapan, yaitu:

- a. Identifikasi, karakterisasi dan evaluasi sumber daya perikanan,
- b. Pemulihan sumber daya ikan,
- c. Monitoring dan evaluasi pemulihan sumber daya ikan, dan
- d. Perumusan kebijakan pemulihan sumber daya ikan.

Tantangan yang harus dihadapi oleh BRPSDI adalah penurunan sumber daya ikan seperti penurunan stok dan rusaknya habitat ikan. Masalah tersebut disebabkan oleh pemanfaatan sumber daya tanpa mempertimbangkan prinsip konservasi seperti eksploitasi ikan yang berlebihan (*illegal fishing*) karena peningkatan permintaan, pembalakan hutan (*illegal logging*), polusi, pembuangan limbah rumah tangga/industri, dan pengelolaan sumber daya ikan yang tidak tepat (introduksi spesies/*alien spesies*). Untuk itu perlu adanya usaha untuk memulihkan baik populasi ikan maupun habitatnya, sehingga sumber daya ikan akan kembali mendekati pada tatanan semula

serta perlu dilakukan upaya riset yang berkelanjutan dan inovasi teknologi untuk mengelola potensi sumber daya yang ada seperti: ekosistem perairan umum, ekosistem mangrove, ekosistem padang lamun, ekosistem terumbu karang, dan ekosistem estuari serta dilakukan penguatan kelembagaan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya ikan secara ramah lingkungan.

Dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran terdapat beberapa tantangan dan kendala yang harus diselesaikan oleh BRPSDI. Permasalahan dan tantangan yang muncul sering kali menjadi faktor penghambatan pencapaian output kegiatan. Tantangan dan kendala yang dihadapi BRPSDI diantaranya :

1. Restrukturisasi organisasi KKP dengan adanya BRIN, BRPSDI berdampak pada sektor aset dan SDM dan Belum adanya kepastian SOTK yang baru atas perubahan Organisasi;

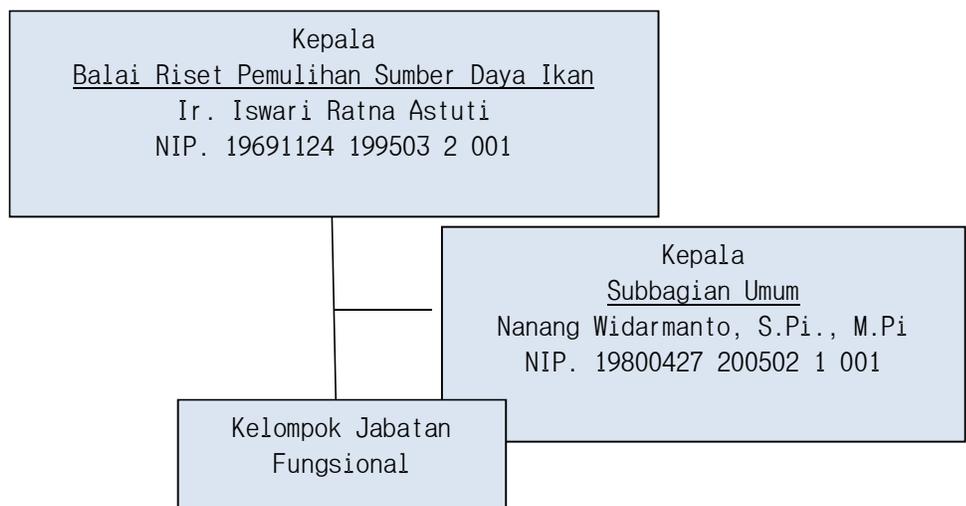
Berdasarkan hasil identifikasi tantangan dan kendala tersebut, Kepala Balai, Kasubbag Umum dan para subkoordinator melakukan pertemuan internal guna melakukan beberapa upaya pengendalian dan langkah strategis agar output kegiatan tetap dapat tercapai berdasar arahan dari pimpinan di tingkat eselon I dan II.

Terlepas dari proses pelaksanaan kegiatan tahun 2024 yang mengalami beberapa kendala, sebagian besar kegiatan kunci/prioritas lainnya baik riset, manajerial, maupun layanan perkantoran terus berjalan. Seluruh kegiatan ditargetkan selesai sebelum Tahun Anggaran 2024 berakhir.

A.1.2. Susunan Organisasi dan Dukungan Sumber Daya Manusia

Susunan organisasi dan tata kerja Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI) tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.80/MEN/2020, tanggal 28 Desember 2020 yang mendapat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dalam surat Nomor: B/1380/M.KT.01/2020, tanggal 2 Oktober 2020. Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan dipimpin oleh seorang Kepala dengan jabatan struktural eselon III.b. Susunan organisasi BRPSDI terdiri atas:

- 1) Subbagian Umum, yang mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional, yang saat ini terdiri atas jabatan fungsional peneliti, teknisi litkayasa, Analis Keuangan APBN, Pranata Keuangan APBN dan pustakawan.



Namun setelah diundangkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dimana dalam Pasal 65 ayat (1) menyebutkan bahwa tugas, fungsi dan kewenangan pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan kementerian/lembaga dialihkan menjadi tugas, fungsi dan kewenangan BRIN, maka tugas dan fungsi BRPSDI sebagai unit kerja KKP yang melaksanakan riset pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut beralih menjadi tugas dan tanggung jawab BRIN. BRPSDI diharapkan dapat segera mengusulkan penambahan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) kepada Pusat/Sekretariat maupun Biro Sumber Daya Manusia Aparatur KKP. Hal ini dikarenakan jumlah pegawai yang ada saat ini tidak sebanding dengan beban kerja yang semakin besar dan dinamis. Berdasarkan hasil Analisis Beban Kerja Pegawai Tahun 2024, BRPSDI membutuhkan sekurang-kurangnya 7 hingga 9 pegawai untuk mengisi jabatan pelaksana administrasi dan Fungsional Lainnya.

A.1.3. Visi dan Misi

Visi KKP adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Implementasi dari visi dan misi Presiden dilakukan secara bertanggung jawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis eselon III.b yang mempunyai tugas melaksanakan riset pemulihan sumber

daya ikan perairan tawar dan laut. Dalam menjalankan tugasnya, BRPSDI berpedoman pada visi sebagai berikut:

" Menjadi lembaga riset yang menyediakan IPTEK pemulihan sumber daya ikan untuk mendukung pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan "

Misi Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan adalah turunan dari misi Presiden dan KKP dalam bidang riset kelautan dan perikanan. Dari 9 (sembilan) misi Presiden, Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan mendukung 3 (tiga) misi yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi riset dan inovasi iptek perikanan terhadap perekonomian masyarakat KP
2. Misi ke-4 yakni Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2024 Tahun Anggaran 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai

dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

*Basis
Akuntansi*

Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2024 Tahun Anggaran 2024 dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahunan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2024 Tahun Anggaran 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Tahun Anggaran 2024 ini telah sesuai dengan Peraturan

Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga dan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 224/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 218/PMK.05/2016 tentang perubahan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat serta mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor PER.19/MEN/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

Pendapatan -LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayarkan kembali.
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto,

dan tidak mencatat jumlah nettoya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Perpajakan, Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Pendapatan Hibah.

(2) Pendapatan- LO

*Pendapatan
-LO*

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang

tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di

neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua	50%

	tidak dilakukan pelunasan	
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
 - Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan

minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

*Penyusutan
Aset Tetap*

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan

manfaat dari suatu aset tetap.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

*Aset
Lainnya*

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai

kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Dalam basis akrual, pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas. Ekuitas disajikan dalam neraca dan laporan perubahan ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan sampai dengan 31 Desember 2024, Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 7 (Tujuh) kali dari DIPA awal Tahun Anggaran 2024. Hal tersebut berkaitan dengan adanya perubahan kebijakan baik internal maupun eksternal.

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2024 Tahun Anggaran 2024 tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain :

Uraian	2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Penerimaan Perpajakan		
Penerimaan Negara bukan Pajak	2,000,000	2,000,000
Jumlah Pendapatan	2,000,000	2,000,000
Belanja		
Belanja Pegawai	2,936,977,000	2,606,977,000
Belanja Barang	4,017,900,000	4,017,900,000
Belanja Modal	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	6,954,877,000	6,624,877,000

B.1 Pendapatan

*Realisasi
Pendapatan
Negara
Rp.16.993.520,-*

Realisasi Pendapatan Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah senilai Rp.16.993.520,- atau mencapai 850% (Delapan ratus lima puluh persen) dari estimasi pendapatan yang ditetapkan senilai Rp.2.000.000,- .

Realisasi Pendapatan Balai Riset Pemulihan Sumber Daya ikan per 31 Desember 2024 Tahun Anggaran 2024 terdiri dari :

- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (425131).

- Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tusi (425151)

Hasil Pendapatan Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan s.d 31 Desember 2024 telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan rincian sebagai berikut :

*Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan
Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
Per 31 Desember 2024*

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan PNBP Lainnya :			
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	641,520	100.00%
Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tusi	2,000,000	15,452,000	772.00%
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	-	-	0.00%
Jumlah	2,000,000	16,093,520	849,68%

Pendapatan dari pemanfaatan BMN Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2024 Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (425131) senilai Rp.641.520,- merupakan hasil atas Sewa Rumah Dinas yang dimiliki oleh Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan kepada Pegawai Negeri Sipil lingkup Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan sampai dengan 31 Desember 2024.
- Pendapatan penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan TUSI senilai Rp.15.452.000,- merupakan hasil dari Sewa Alat-alat Laboratorium, Sewa Guest House dengan dasar aturan PP 75 tahun 2017 sebelum PP 85 tahun 2021 terbit.

Secara keseluruhan pendapatan yang diperoleh Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan telah memenuhi target yang telah dianggarkan adapun kendala dalam melakukan proses pendapatan adalah Restrukturisasi Organisasi.

B.2 Belanja

*Realisasi
Belanja Negara
Rp.6.429.107.838,-*

Realisasi Belanja Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2024 Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp.6.429.107.838,- dan dalam prosentase senilai 97% (Sembilan puluh tujuh persen) dari anggaran belanja senilai Rp.6.624.877.000,- .

Rincian anggaran dan realisasi belanja Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2024 Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
Per 31 Desember 2024*

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	2,606,977,000	2,581,690,634	99.03
Belanja Barang	4,017,900,000	3,847,417,204	95.76
Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	6,624,877,000	6,429,107,838	97.04

*Perbandingan Realisasi Belanja
Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	2,581,690,634	2,420,902,121	1.07
Belanja Barang	3,847,417,204	3,855,107,604	1.00
Belanja Modal	-	-	100.00
Jumlah	6,429,107,838	6,276,009,725	1.02

Penurunan dan kenaikan atas realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sampai dengan 31 Desember 2024 diakibatkan atas adanya Efisiensi Anggaran belanja Pembekuan Anggaran dampak atas restrukturisasi Organisasi yang telah Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan lakukan hingga proses 7 kali revisi anggaran serta pada tahun 2024, Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan tidak memiliki belanja Modal (53).

B.2.1 Belanja Pegawai

*Belanja
Pegawai
Rp.2.581.690.6
34,-*

Realisasi Belanja Pegawai Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing senilai Rp.2.581.690.634,- dan Rp.2.420.902.121,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja pegawai Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2024 Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar 1,07% (Satu koma tujuh persen) dari Realisasi belanja pegawai Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan antara lain oleh :

1. Adanya pengurangan pegawai yang dikarenakan Mutasi an. Ade Kusmayadi, S.AP ke Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 85/MEN-SJ.3/KP.432/VIII/2024 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil tanggal 01 Agustus 2024.

B.2.2 Belanja Barang

*Belanja
Barang*

Realisasi Belanja Barang Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember

Rp3.847.417.204- 2023 adalah masing-masing senilai Rp.3.847.417.204,- dan Rp.3.855.107.604,-.

Terkait belanja barang yang telah dilaksanakan Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan telah sesuai Akun pada Anggaran yang dimiliki Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Tahun Anggaran 2024.

B.2.3 Belanja Modal

Belanja Modal Rp.0,- Pada Tahun Anggaran 2024, Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan tidak memiliki Belanja Modal adapun Realisasi Belanja Modal Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2024 adalah masing-masing senilai Rp.0,- dan Rp.0,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Persediaan

Persediaan
an
Rp.50.000,-

Nilai Persediaan Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah senilai Rp.50.000,- dan Rp.41.500,-

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut :

*Rincian Persediaan
Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
Per 31 Desember 2024*

Jenis	TH 2024
Barang Konsumsi	50,000
Barang untuk Pemeliharaan	
Suku Cadang	
Bahan Baku	-
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-
Persediaan Lainnya	-
Jumlah	50,000

Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2024 masih terdapat persediaan Barang Konsumsi yang tersimpan di Gudang Persediaan dengan kode akun Barang : 117111, rincian sebagai berikut :

Nama Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
Map PlastikKancing (Birus)	1	pak	50,000	50,000
Jumlah	1	-	50,000	50,000

C.4 Tanah

Tanah
Rp.8.962
.232.000,
-

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing senilai Rp.8.962.232.000,- dan Rp Rp.8.962.232.000,- . Nilai aset tetap Tanah Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan berasal dari nilai perolehan awal pada saat masih berstatus sebagai Aset tetap Tanah Balai Penelitian Pemulihan dan Konservasi Sumber Daya Ikan senilai Rp.613.753.200,- dan telah di dilakukan revaluasi aset senilai Rp.8.962.232.000,- . Mutasi nilai tanah Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	8,962,232,000
Mutasi tambah:	0
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 30 Juni 2023	8,962,232,000

Rincian saldo Tanah Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

*Rincian Tanah
Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
Per 31 Desember 2024*

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	3.988 m2	Jl. Ipik Gandamanah Purwakarta Jawa Barat	8.962.232.000
Jumlah			8.962.232.000

Tanah seluas 3.988 m2 yang terletak di Jl.Ipik Gandamanah Purwakarta Jawa Barat, pada tanggal pelaporan per 30 Juni 2023, semua tanah telah bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian Kelautan dan Perikanan serta telah dilakukan Revaluasi Aset kembali dengan nomor Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN : 024/REV/WKN.08/KNL.04/2019 tanggal 25 November 2019 dengan nomor

tiket IP-RV-20190718115112666360 (untuk \geq Rp.5 milyar) yang berupa tanah rumah negara golongan II. Sedangkan nomor tiket IP-RV-20190718115224011852 (berupa gedung dan bangunan) dan IP-RV-20190718135018027845 (berupa barang berlebih) sedangkan Revaluasi Aset sebelumnya dengan nomor Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN : 027/WKN.08/KNL.04/2017 tanggal 27 November 2017 oleh Tim Pelaksana Penilai Kembali Barang Milik Negara KPNL Purwakarta dan sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian nomor : BAR-027/IP/WKN.08/KML.04/2017 tanggal 27 November 2017 .

Adapun rincian tanah yang dimiliki Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan sebagai berikut :

1. Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II dengan luas 2.263 m² senilai Rp5.085.640.000,- (Sertifikat No. 00001, Kode Barang : 2010101002).
2. Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II dengan luas 1.725 m² senilai Rp3.876.592.000,- (Sertifikat No. 00002, Kode Barang : 2010101002).

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas (M ²)	Nilai (Rp)
Baik	3.988	8.962.232.000
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

C.4 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin Rp.8.781.021.140,-

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing senilai Rp.8.781.021.140,- dan Rp.8.761.521.140,- Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan

Keuangan ini.

C.5 Gedung dan Bangunan

*Gedung
dan
Bangunan
Rp.5.323
.897.000,
-*

Nilai Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing senilai Rp.5.323.897.000,- dan Rp.5.940.954.000,- Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 30 Juni 2023 pada tanggal pelaporan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	5,940,954,000
Mutasi tambah:	-
Pembangunan tambahan ruang kelas	-
Mutasi kurang:	617,057,000
Saldo per 31 Desember 2024	5,323,897,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	5,323,897,000

Gedung dan Bangunan yang dimiliki oleh Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan telah memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan keterangan sebagai berikut :

- Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan nomor : 503/IMB.410-DTRB/2004 tanggal 17 September 2004 atas nama Kantor Loka Riset Pemacuan Stok Ikan Jatiluhur dengan luas bangunan : Bang. LT. I = 167,2 M² , Bang. LT II = 250,75 M² , Teras = 30 M² , Rabat = 30,5 M² , Septitank = 4,5 M² , yang didirikan diatas tanah seluas = 587,5 M² dari tanah seluas = 481,750 M² sesuai dengan Sertifikat Hak Pengelolaan No. 3 an. Perusahaan Umum Otorita Jatiluhur (Sewa Menyewa), yang berlokasi di Jl. Cilalawi Tromol pos No. 1 Blok O Desa Jatimekar Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat Kode Pos 41152

- Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan nomor : 503/IMB.330-DTRB/2001 tanggal 16 November 2001 untuk Mendirikan Bangunan Rumah Dinas dengan luas Bangunan : Bangunan = 1.718,21 M² , Teras = 241,30 M² , Rabat/Carport = 147,82 M² , Septitank = 84,00 M² yang didirikan diatas tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai No. 1 dan 2 seluas = 4.425,00 M² YANG BERLOKASI DI Jalan Perumahan Munjul Jaya Permai RT 09 RW 02 Kelurahan Munjul Jaya Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat.
- Nomor Objek Pajak PBB : 32.16.010.006.002.0000-0 An. BRPSDI dengan Luasan 5.000 M².

Bangunan Gedung pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan terdiri atas:

1. Bangunan Gedung Kantor Permanen

Bangunan gedung kantor permanen pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan sebanyak 1 unit dengan nilai Rp.3.854.200.000,-

Bangunan gedung kantor permanen pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan berdiri diatas tanah Perum Jasa Tirta II (PJT II) Jalan Cilalawi No.2 Jatiluhur, Purwakarta-Jawa Barat 41152 IMB Nomor: 503/IMB.410-DTRB/2004 tanggal 17 September 2004.

. Dan setiap tahun Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan membayar uang sewa atas pemanfaatan tanah tersebut senilai Rp.135.755.213 untuk tahun anggaran 2021 dengan nomor perjanjian sewa lahan nomor : SP-PLP.NP/01/GMPA.DKS/PH/01/2021 tanggal 01 Januari 2021 dan telah dibayarkan sesuai faktur tagihan Lahan nomor : 01-SPPL-F/GMPH.DPU/II/2021 tanggal 03 Februari 2021 dan Nomor SP2D : 210211303000071 tanggal 08 Februari 2021.

2. Gedung Pos Jaga Permanen

Gedung pos jaga permanen pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan sebanyak 1 unit dengan nilai Rp.6.609.000,-

Gedung pos jaga tersebut berada pada Kantor Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan sebanyak 1 unit dengan nilai Rp6.609.000,- dengan IMB Nomor: 503/IMB.410-DTRB/2004 tanggal 17 September 2004.

dan 1 unit dengan nilai Rp4.238.000,- berlokasi di Komplek Perumahan Perikanan yang berada di Jalan Ipik Gandamana RT/RW.09/02 Kelurahan Munjul Jaya Kabupaten Purwakarta-Jawa Barat, dengan IMB Nomor: 503/IMB.330-DTRB/2001 tanggal 16 November 2001.

3. Gedung Garasi/Pool Permanen

Gedung garasi/pool permanen pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan sebanyak 1 unit dengan nilai Rp.102.505.000,-

berdiri diatas tanah Perum Jasa Tirta II (PJT II) Jalan Cilalawi No.2 Jatiluhur, Purwakarta-Jawa Barat 41152.

4. Rumah Negara

Rumah Negara pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan sebanyak 16 unit dengan nilai Rp.1.688.528.000,-

Rumah Negara terdiri dari Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen, Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen, Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen, dan Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen. Rumah Negara tersebut berlokasi di Komplek Perumahan Perikanan yang berada di Jalan Ipik Gandamanah RT/RW.09/02 Kelurahan Munjul Jaya Kabupaten Purwakarta-Jawa Barat, dengan IMB Nomor: 503/IMB.330-DTRB/2001 tanggal 16 November 2001.

5. Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan

Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan sebanyak 1 unit dengan nilai Rp.449.967.000,-

Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan berdiri diatas tanah Perum Jasa Tirta II (PJT II) Jalan Cilalawi No.2 Jatiluhur, Purwakarta-Jawa Barat. IMB Nomor: 503/IMB.410-DTRB/2004 tanggal 17 September 2004.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.6 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Jalan, Jar
ingan
dan
Irigasi
Rp.1.431
.867.000,
-*

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang dimiliki Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing senilai Rp.1.431.867.000,- dan Rp Rp.1.431.867.000,- . Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2024 pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	1,431,867,000
Mutasi tambah:	-
Penambahan jaringan teknologi informasi	-
Mutasi kurang:	-
Saldo 31 Desember 2024	1,431,867,000
Penyusutan s.d 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	1,431,867,000

*Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan
Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
Per 31 Desember 2024*

Uraian	Kuantitas	Nilai
JALAN & JEMBATAN	-	-
Jalan Khusus Komplek	913 M2	98.470.000
IRIGASI		
Bangunan Penguat Tebing/Pantai	1 unit	772.612.000
JARINGAN		
Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Sedang	3 unit	560.785.000
Jumlah		1.431.867.000

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.7 Aset Tetap Lainnya

*Aset
Tetap
Lainnya
Rp.107.8
98.000,-*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai Saldo Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing senilai Rp.107.898.000,- dan Rp.109.433.000,- .

Aset tetap tersebut berupa buku yang dimiliki Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan dengan jumlah sebanyak 65 buku yang tersimpan pada Perpustakaan milik Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan.

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.8 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumula
si
Penyusut
an Aset
Tetap
(Rp.13.4
86.384,8
27,-)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing senilai (Rp.13.486.384.827,-) dan (Rp.13.444.083.831,-) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

C.9 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Rp.0,-

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) yang dimiliki Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing senilai Rp.0,- dan Rp. 43.350.000,- .

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud (ATB) pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2023 berupa *Hak Paten Sederhana, Software Komputer*.

Nilai saldo atas Aset Tak Berwujud Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2023 merupakan berdasarkan Hasil Kesepakatan Teknis tindak lanjut temuan BPK RI Tahun Anggaran 2018 berupa Hasil Kajian/Penelitian (Rekomtek) yang dimiliki Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan senilai Rp.1.183.503.057,- harus dikeluarkan dari Neraca Simak-BMN Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan karena Hasil Kajian/Penelitian (Rekomtek) tidak termasuk dalam Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara dan Surat dari Ketua Komite Kerja, Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) nomor S-44/K.1/KSAP/V/2019 tanggal 06 Mei 2019 perihal Penjelasan perlakuan Akuntansi atas Rekomendasi Teknologi Kelautan dan Perikanan. Adapun Hasil Kajian/Penelitian Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan antara lain :

- Hasil Kajian/Penelitian pada Tahun 2014 dengan judul Penelitian terdiri dari : Teknologi Pengendalian Gulma Air, Eceng Gondok (*Eichornia crassipes*) di Perairan Umum Daratan, Penentuan Calon Kawasan Konservasi Sumberdaya Pesisir dan Perairan Umum (Studi Kasus : Teluk Cempi, Nusa Tenggara Barat), Teknologi Rehabilitasi Habitat dan Pemulihan Sumber Daya Ikan Melalui Pengembangan Terumbu Karang dan Hasil Kajian/Penelitian pada Tahun 2016 dengan judul Penelitian : Teknologi Pengendalian Buangan Sisa Pakan dengan Aplikasi Rancangan SMART KJA.

Daftar Aset Tidak berwujud yang dimiliki Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan sebagai berikut :

- Hak Paten Sederhana berupa Alat Ukur Ikan Sidat sesuai dengan Sertifikat Paten Sederhana yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor Paten IDS000001470 tanggal pemberian 22 September 2016 kepada selaku Inventor adalah Tri Muryanto dan Mujiyanto, S.St.Pi, M.Si yang merupakan Pegawai Negeri Sipil lingkup Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan dan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan nomor : 1/PER-BRS/2018 tanggal 4 Januari 2018 tentang Pengakuan dan Penilaian Aset Tak Berwujud Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.
- Software Aplikasi Perkantoran yang dimiliki Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan sebagai berikut :



C.10 Dana yang dibatasi penggunaannya

Saldo Dana yang dibatasi penggunaannya yang dimiliki Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2022 senilai Rp.80.493.041,-. Dana yang dibatasi penggunaannya tersebut merupakan saldo RPARTA akhir tahun 2024 atas pembayaran kontraktual Pengadaan Jasa Langsung Pegawai (PJLP) sebanyak 10 Pegawai, Termin ke 12 pengadaan Tenaga Gardener dan Cleaning Service serta termin ke-13 Pengadaan Satuan Pengamanan. Saldo Dana yang dibatasi penggunaannya tersebut telah dipertanggungjawabkan pembayarannya pada tanggal 03 Januari 2025 .

C.11 Aset Lain-Lain

*Aset
Lain-Lain
Rp.660.4
07.000,-*

Saldo Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp.660.407.000,- dan Rp.0,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.11 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
(Rp.165.6
01.636,-)*

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya yang dimiliki Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing senilai Rp.(165.601.636,-) dan Rp.(39.827.500,-) Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

C.12 Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang
kepada
Pihak
Ketiga
Rp.93.94
1.636,-*

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga yang dimiliki Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing senilai Rp.93.941.636,- dan 0,- Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban/Beban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan dan telah diselesaikan per 03 Januari 2025.

Utang kepada pihak ketiga yang dimiliki Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

1. Pembayaran Pengadaan Tenaga Outsourcing Gardener sesuai BAST/BAPP Nomor 004/BAPP/PTKBB/XII/2024 Tanggal 31-12-2024
2. Pembayaran Pengadaan Tenaga Satuan Pengamanan sesuai BAST/BAPP Nomor 025/HRD/DMT-HO/XII/2024 Tanggal 31-12-2024
3. Pembayaran Pengadaan Jasa Alih Daya Cleaning Service sesuai BAST/BAPP Nomor 003/BAPP/PTKBB/XII/2024 Tanggal 31-12-2024
4. Pembayaran Pengadaan Jasa Lainnya Perorangan Petugas Kemanan an. Edri Susanto sesuai BAST/BAPP Nomor 123/BAPP/PJLP/XII/2024 Tanggal 31-12-2024
5. Pembayaran Pengadaan Jasa Lainnya Perorangan Tenaga Teknis Integrasi Logika Sistem sesuai BAST/BAPP Nomor 129/BAPP/PJLP/XII/2024 Tanggal 31-12-2024
6. Pembayaran Pengadaan Jasa Lainnya Perorangan Petugas Kemanan an. Erik Prawirta sesuai BAST/BAPP Nomor 124/BAPP/PJLP/XII/2024 Tanggal 31-12-2024
7. Pembayaran Pengadaan Jasa Lainnya Perorangan Pramubakti sesuai BAST/BAPP Nomor 121/BAPP/PJLP/XII/2024 Tanggal 31-12-2024

8. Pembayaran Pengadaan Jasa Lainnya Perorangan Pengemudi Operasional an. Wandu Sholihin sesuai BAST/BAPP Nomor 127/BAPP/PJLP/XII/2024 Tanggal 31-12-2024
9. Pembayaran Pengadaan Jasa Lainnya Perorangan Petugas Kemanan an. Mansur Nur Salim sesuai BAST/BAPP Nomor 125/BAPP/PJLP/XII/2024 Tanggal 31-12-2024
10. Pembayaran Pengadaan Jasa Lainnya Perorangan Pengemudi Operasional an. Gusman sesuai BAST/BAPP Nomor 128/BAPP/PJLP/XII/2024 Tanggal 31-12-2024
11. Pembayaran Pengadaan Jasa Lainnya Perorangan Petugas Kemanan an. Agus Mulyana sesuai BAST/BAPP Nomor 122/BAPP/PJLP/XII/2024 Tanggal 31-12-2024
12. Pembayaran Pengadaan Jasa Lainnya Perorangan Pengemudi Pimpinan sesuai BAST/BAPP Nomor 126/BAPP/PJLP/XII/2024 Tanggal 31-12-2024
13. Pembayaran Pengadaan Jasa Lainnya Perorangan Sekretaris Pimpinan sesuai BAST/BAPP Nomor 120/BAPP/PJLP/XII/2024 Tanggal 31-12-2024

C.13 Utang yang belum ditagihkan

Utang yang belum ditagihkan Rp0,-

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2024 senilai Rp.0,- Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga..

C.14 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN Rp.0,-

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2024 senilai Rp.0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan

C.15 Ekuitas

*Ekuitas
Rp.11.601.937.082,-
1.937.082,-*

Ekuitas Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing senilai Rp.11.601.937.082,- dan Rp.11.763.952.309,- Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Dalam basis akrual, entitas hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan PNPB
Rp.16.093.250,-*

Nilai Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dimiliki Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing senilai Rp.16.093.250 dan Rp. 28.922.360,-. Pendapatan tersebut terdiri dari :

*Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
Per 31 Desember 2024*

URAIAN	REALISASI TA. 2024
Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	641,520
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	15,452,000
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi lainnya	
Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan dan Pengembangan Iptek Lainnya	
Jumlah	16,093,520

Realisasi Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2024 menghasilkan realisasi senilai Rp.16.093.520,-.

Pendapatan dari pemanfaatan BMN Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut :

- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (425131) senilai Rp.641.520,- merupakan hasil atas Sewa Rumah Dinas yang dimiliki oleh Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan kepada Pegawai Negeri Sipil lingkup Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan sampai dengan 31 Desember 2024 an. Ade Kusmayadi, S.AP.
- Pendapatan penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan TUSI senilai Rp.15.452.000,- merupakan hasil dari Sewa Alat-alat Laboratorium, Guest House dan Sarpras lainnya dengan dasar aturan PP 75 tahun 2017 sebelum PP 85 tahun 2021 terbit.

D.2 Beban Pegawai

*Beban
Pegawai
Rp.2.581.6
90.634,-*

Nilai Jumlah Beban Pegawai Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing senilai Rp.2.581.690.634,- dan Rp.2.420.902.121,- Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban pegawai dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai atau/tagihan kewajiban pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.

D.3 Beban Persediaan

*Beban
Persediaan
Rp.12.003
.000,-*

Nilai jumlah Beban Persediaan Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing senilai Rp.12.003.000,- dan Rp.36.069.000,- Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan

transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir tahun beban persediaan dilakukan penyesuaian dalam hal berdasarkan hasil inventarisasi fisik terhadap perhitungan perbedaan pencatatan persediaan.

D.4 Beban Barang dan Jasa

*Beban
Barang
dan Jasa
Rp.2.368.
471.365,-*

Nilai jumlah Beban Barang dan Jasa Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing senilai Rp.2.368.471.365,- dan Rp.2.350.697.980,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa dicatat sebesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset. Adapun belanja barang dan jasa terkait penanganan Pandemi Covid 19 yang dimiliki Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan telah menggunakan Akun belanja Khusus Penanganan Pandemi Covid 19.

D.5 Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan
Rp.1.312.
469.323,-*

Nilai Beban Pemeliharaan Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing senilai Rp.1.312.479.323,- dan Rp.1.229.314.616,- Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan dicatat sebesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajiban pembayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui oleh KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.

D.6 Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp.167.92
5.111,-*

Nilai beban Perjalanan Dinas Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing senilai Rp.167.925.111,- dan Rp.226.277.757,- Beban Perjalanan Dinas tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban perjalanan dinas dicatat sebesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/ atau tagihan kewajiban pembayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/ PPK.

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan
dan
Amortisasi
Rp.168.075.131,-*

Nilai jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan untuk per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing senilai Rp.168.075.131,- dan Rp.345.887.906,- Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing-masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.

D.8 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

*Surplus/(
Defisit)
dari
Kegiatan
Non
Operasional
(Rp.0,-)*

Pos Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Pos Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan yang tercatat per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing senilai Rp.0,- dan (Rp.13.511.250,-)

**) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

D.9 Pos Luar Biasa

*Pos Luar
Biasa
Rp.0,-*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Nilai Pos Luar Biasa Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan tercatat per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing senilai Rp.0,- dan Rp.0,- .

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

*Ekuitas
Awal
Rp.11.763
.952.309,-*

Nilai ekuitas Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing senilai Rp.11.763.952.309,- dan Rp.12.110.603.214,- Hal ini antara lain disebabkan karena Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan berkedudukan awal sebagai Balai Penelitian Pemulihan Sumber Daya Ikan yang telah dilikuidasi sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor : 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Serta Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan nomor : 74/KEP-

BRSDM/2017 tentang Penanggung Jawab Likuidasi Satuan Kerja Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

E.2 Surplus/(Defisit) LO

*Surplus/
Defisit)-LO
(Rp.6.593.
671.045,-)*

Nilai jumlah Defisit-LO Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing senilai (Rp.6.593.671.045,-) dan (Rp.6.593.738.270,-). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. Nilai Surplus/(Defisit) – LO yang tercatat pada Laporan Perubahan Ekuitas Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan untuk periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 merupakan nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional yang tercatat pada Laporan Operasional .

*Koreksi
yang
menamba
h/mengur
angi
Ekuitas
yang
antara lain
berasal
dari
Dampak
Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi
/Kesalaha
n
Mendasar
(Rp.41.50
0-)*

E.3 Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing senilai Rp.41.500,- dan Rp.0,-.

Nilai koreksi tersebut atas adanya Koreksi nilai Persediaan Tahun 2024 pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan.

E.3.1 Selisih Revaluasi Aset Tetap

*Selisih
Revaluasi
Aset Tetap
(Rp.0,-)*

Nilai Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing senilai Rp.0,- dan Rp.0,-.

E.3.2 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

*Koreksi
Aset Tetap
Non
Revaluasi
Rp.0,-*

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing senilai Rp.0,- dan Rp.0,-. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai .

E.4 Transaksi Antar Entitas

*Transaksi
Antar
Entitas
Rp.6.431.
614.318,-*

Nilai Transaksi Antar Entitas Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing senilai Rp.6.431.614.318,- dan Rp. 6.247.087.365,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

E.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp.11.601.937.082,-

Nilai Ekuitas Akhir Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing senilai Rp.11.601.937.082,- dan Rp.11.763.952.309,- .

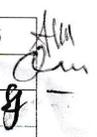
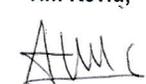
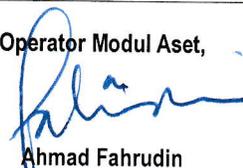
A. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

**F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL
NERACA**

Tidak ada pengungkapan.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Tidak ada pengungkapan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Inspektorat Jenderal		Disusun oleh/Tanggal	Samudra / 16 Januari 2025	
		Direviu oleh/Tanggal	Agung / 16 Januari 2025	
		Disetujui oleh/Tanggal	Sonya/ 16 Januari 2025	
UAPA	<input type="checkbox"/>	(032) Kementerian Kelautan dan Perikanan		
UAPPA-E1	<input type="checkbox"/>	(12) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan		
UAPPA-W	<input type="checkbox"/>	(0200) Jawa Barat		
UAKPA	<input type="checkbox"/>	(403824) Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan		
Uraian Catatan Hasil Reviu				Indeks KKR
Penyelenggaraan Akuntansi :				
<ol style="list-style-type: none"> Berita Acara Rekon Internal telah disusun dan ditandatangani pada 31 Desember 2024 dan tidak terdapat selisih. Terdapat penambahan Peralatan dan Mesin senilai Rp19.500.000,00 yang merupakan Transfer Masuk dari BRPBAPPP Maros berupa 1 unit LCD Projector/Infocus senilai Rp7.000.000,00 dan 1 unit Note Book senilai Rp12.500.000,00 yang telah dilengkapi BAST. Terdapat penurunan Aset Tak Berwujud senilai Rp43.350.000,00 yang telah dilengkapi permohonan penerbitan SK Penghapusan BMN berupa Aset Tak Berwujud dari Daftar KPB BRPSDI tanggal 15 Januari 2025 senilai Rp43.350.000,00. Telah dilakukan stok opname persediaan sesuai BA Hasil Inventarisasi Persediaan Nomor: B.1093/BRPSDI/PL.510/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 terdiri dari barang konsumsi senilai Rp50.000,00. 				
Penyajian LK :				
A. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) :				
Pagu anggaran tahun 2024 senilai Rp6,624,877,000 dan realisasi senilai Rp6.429.107.838 telah sesuai dengan omspan.				
B. Laporan Operasional :				
Tidak terdapat koreksi				
C. Laporan Perubahan Ekuitas :				
Tidak terdapat koreksi				
D. Neraca :				
Tidak terdapat koreksi				
E. Catatan atas Keuangan (CaLK) dan CLBMN				
Tidak terdapat koreksi				
Usulan Koreksi				
Tidak ada koreksi				
Tindak Lanjut				
-				
Jakarta, 16 Januari 2025				
Tim Reviu,  Akhmad Samudra	Operator Modul GLP,  Ginanjar Adhi Akbar	Operator Modul Aset,  Ahmad Fahrudin		

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN 12
SATUAN KERJA : BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN 403824

Tgl Data : 15/01/25 12:55 PM
Tgl Cetak : 15/01/25 6:56 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	6,624,877,000	6,429,107,838	(195,769,162)	97	6,331,689,000	6,276,009,725	55,679,275	99
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Purwakarta, 15 Januari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



Iswari Ratna Astuti
Pembina 196911241995032001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (403824) BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN

Tgl Data : 15/01/25 12:39 PM

Tgl Cetak : 15/01/25 6:10 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	50,000	41,500	8,500	20.48
JUMLAH ASET LANCAR	50,000	41,500	8,500	20.48
ASET TETAP				
Tanah	8,962,232,000	8,962,232,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	8,781,021,140	8,761,521,140	19,500,000	0.22
Gedung dan Bangunan	5,323,897,000	5,940,954,000	(617,057,000)	(10.39)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,431,867,000	1,431,867,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	107,898,000	107,898,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(13,486,384,827)	(13,444,083,831)	(42,300,996)	0.31
JUMLAH ASET TETAP	11,120,530,313	11,760,388,309	(639,857,996)	(5.44)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	0	43,350,000	(43,350,000)	(100.00)
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	80,493,041	0	80,493,041	0.00
Aset Lain-lain	660,407,000	0	660,407,000	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(165,601,636)	(39,827,500)	(125,774,136)	315.80
JUMLAH ASET LAINNYA	575,298,405	3,522,500	571,775,905	16,232.11
JUMLAH ASET	11,695,878,718	11,763,952,309	(68,073,591)	(0.58)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	93,941,636	0	93,941,636	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	93,941,636	0	93,941,636	
JUMLAH KEWAJIBAN	93,941,636	0	93,941,636	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	11,601,937,082	11,763,952,309	(162,015,227)	(1.38)
JUMLAH EKUITAS	11,601,937,082	11,763,952,309	(162,015,227)	(1.38)
JUMLAH EKUITAS	11,601,937,082	11,763,952,309	(162,015,227)	(1.38)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	11,695,878,718	11,763,952,309	(68,073,591)	(0.58)

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Purwakarta, 15 Januari 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



Iswari Ratna Astuti

Pembina 196911241995032001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (403824) BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN

Tgl Data : 15/01/25 12:55 PM

Tgl Cetak : 15/01/25 6:56 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	50,000	0
0.0	131111	Tanah	8,962,232,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	8,781,021,140	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	5,323,897,000	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	98,470,000	0
0.0	134112	Irigasi	772,612,000	0
0.0	134113	Jaringan	560,785,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	107,898,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	8,605,986,007
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	3,830,113,477
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	98,470,000
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	772,612,000
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	179,203,343
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	80,493,041	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	617,057,000	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	43,350,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	125,079,136
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	40,522,500
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	13,448,595
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	80,493,041
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	6,429,107,838
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	16,993,520	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	19,500,000
0.0	391111	Ekuitas	0	11,763,952,309
0.0	391113	Koreksi Nilai Persediaan	0	41,500
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	641,520
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	15,452,000
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	900,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	811,525,300	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	12,211	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	61,911,230	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	17,644,992	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	20,580,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	91,224,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	8,576,516	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	44,176,200	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	108,656,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (403824) BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN

Tgl Data : 15/01/25 12:55 PM

Tgl Cetak : 15/01/25 6:56 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	15,055,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	143,279,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,259,050,185	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	603,474,465	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	47,500	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	60,456,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	109,526,071	0
3.0	521211	Beban Bahan	15,828,000	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	8,160,000	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	164,910,000	0
3.0	521253	Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	24,963,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	160,673,786	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	51,278,010	0
3.0	522141	Beban Sewa	104,947,751	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	1,064,206,782	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	415,981,000	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	358,786,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	537,702,323	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	167,925,111	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	86,740,133	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	58,274,138	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	14,027,251	0
3.0	592114	Beban Amortisasi Paten	347,500	0
3.0	592118	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	347,500	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	8,338,610	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	12,033,000	0
JUMLAH			31,975,523,266	31,975,523,266

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Purwakarta, 15 Januari 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



Iswari Ratna Astuti

Pembina 196911241995032001

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 ESELON I : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN
 WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT
 SATUAN KERJA : (403824) BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN

Tgl Data : 15/01/25 12:55 PM

Tgl Cetak : 15/01/25 6:42 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	16,993,520	28,922,360	(11,928,840)	(41.244)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	16,993,520	28,922,360	(11,928,840)	(41.244)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	(16,993,520)	(28,922,360)	11,928,840	(41.244)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	2,581,690,634	2,420,902,121	160,788,513	6.642
Beban Persediaan	12,033,000	36,069,000	(24,036,000)	(66.639)
Beban Barang dan Jasa	2,368,471,365	2,350,697,980	17,773,385	0.756
Beban Pemeliharaan	1,312,469,323	1,229,314,616	83,154,707	6.764
Beban Perjalanan Dinas	167,925,111	226,277,757	(58,352,646)	(25.788)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (403824) BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN

Tgl Data : 15/01/25 12:55 PM

Tgl Cetak : 15/01/25 6:42 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	168,075,132	345,887,906	(177,812,774)	(51.408)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	(6,610,664,565)	(6,609,149,380)	(1,515,185)	0.023
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	6,593,671,045	6,580,227,020	13,444,025	0.204
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	(13,511,250)	13,511,250	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	(13,511,250)	13,511,250	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	(13,511,250)	13,511,250	(100)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	6,593,671,045	6,593,738,270	(67,225)	(0.001)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	6,593,671,045	6,593,738,270	(67,225)	(0.001)

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Purwakarta, 15 Januari 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



Iswari Ratna Astuti
Pembina 196911241995032001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (403824) BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN

Tgl Data : 15/01/25 12:39 PM

Tgl Cetak : 15/01/25 6:56 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	11,763,952,309	12,110,603,214	(346,650,905)	(2.86)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(6,593,671,045)	(6,593,738,270)	67,225	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	41,500	0	41,500	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	41,500	0	41,500	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	6,431,614,318	6,247,087,365	184,526,953	2.95
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(162,015,227)	(346,650,905)	184,635,678	(53.26)
EKUITAS AKHIR	11,601,937,082	11,763,952,309	(162,015,227)	(1.38)

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Purwakarta, 15 Januari 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



Iswari Ratna Astuti

Pembina 196911241995032001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN 12
SATUAN KERJA : BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN 403824

Tgl Data : 15/01/25 12:55 PM
Tgl Cetak : 15/01/25 8:47 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	6,624,877,000	6,429,107,838	(195,769,162)	97	6,331,689,000	6,276,009,725	55,679,275	99
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Purwakarta, 15 Januari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



Iswari Ratna Astuti
Pembina 196911241995032001